

Bulog Jabar Siap Salurkan CBP Mulai Januari Hingga Juni

BANDUNG (IM)- Perum Bulog Wilayah Jawa Barat siap menyalurkan bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayahnya selama bulan Januari hingga Juni 2024.

Pimpinan Perum Bulog Jabar, M. Attar Rizal, menyebutkan jumlah beras yang disiapkan pihaknya akan disesuaikan dengan data KPM sebanyak 4.445.601 masyarakat di 27 kabupaten/kota. "Pemberian bantuan pada tahun ini diberikan sampai bulan Juni. Kita sudah siapkan alurnya dan mekanisme pengirimannya lewat PT Pos Indonesia," kata Attar di Bandung, Senin (22/1).

Ia menjelaskan untuk jenis beras yang disalurkan pada program bantuan pangan ini adalah beras medium yang akan dibagikan 10 kilogram beras untuk keluarga penerima manfaat. "Bantuan pangan ini diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat penerima bantuan pangan, serta dapat menstabilkan harga beras," kata dia.

Lebih lanjut, kata dia, sebelum disalurkan kepada KPM, beras bantuan pangan tersebut telah melewati proses pengecekan kualitas yang ketat oleh PT Pos Indonesia untuk membantu kelancaran dan keamanan dalam proses pendistribusian beras

tersebut.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk melapor jika menemukan atau mendapatkan beras yang tidak layak konsumsi. "Kami terus jaga komitmen kami, jadi bila ada masyarakat yang menerima beras di bawah kualitas beras medium dan timbangan kurang dari 10 kilogram, agar menghubungi petugas desa atau PT. Pos untuk dapat segera menukar beras tersebut," katanya.

Attar memastikan stok beras yang ada di gudang mereka mencukupi untuk pembagian bantuan sosial beras sekaligus penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Dia menjelaskan, hingga saat ini Bulog Jabar memiliki 74.000 ton stok beras. Kemudian, Bulog Jabar akan kedatangan kembali sebanyak 88.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Kemudian selama Januari sampai dengan Maret belum ada panen, kita akan menambah dari pengadaan luar negeri yang saya rasa cukup. Karena kapal yang akan datang mengirim 88.000 ton," kata dia. ● **pra**

23.000 Pemilih Pemula Kuningan Belum Miliki KTP

KUNINGAN (IM)- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, jemput bola perekaman E-KTP terhadap para pelajar tingkat menengah atas ke sekolah-sekolah pada Senin (22/1).

Pemerintah mendata, ada sekitar 23.000 warga Kuningan masuk kategori pemilih pemula dan belum memiliki E-KTP. Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan, Yuda Nugraha, menyampaikan program jemput bola perekaman terhadap pemilih pemula ini menjadi prioritas. Pasalnya, pemerintah berupaya memenuhi hak para pemilih untuk menyalurkan suaranya pada 14 Februari.

"Kita namakan Pusaka U 17, Perekaman Data Untuk Siswa Kuningan Usia 17 Tahun. Ini satu langkah penting untuk memberikan dokumen kependudukan pemilih pemula yang nanti akan memilih pada 14 Februari mendatang," kata Yuda saat ditemui di SMKN 1 Kuningan, Senin (22/1).

Sebanyak 23.000 warga pemilih pemula tersebut, sambung Yuda, mayoritas merupakan pelajar atau siswa-siswi di tingkat sekolah

menengah atas. Sehingga program jemput bola ke sekolah, dinilai efektif untuk mempercepat progres penyelesaian.

Adapun data capaian hari ini sebanyak 10.649 pemilih pemula yang melakukan perekaman dan penerbitan e-KTP. Sehingga sekitar 12.351 pemilih pemula lainnya ditargetkan selesai 13 Februari mendatang.

"Data awal sebanyak 23.000 pemilih pemula. Hari ini kami lihat perkembangannya tersisa 12.351. Kita akan terus melaksanakan hingga tanggal 13 Februari mendatang," tegas Yuda.

Caranya, petugas Disdukcapil akan mendatangi sekolah-sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan, yang memiliki data pemilih pemula di atas 400 orang. Salah satunya, SMKN 1 Kuningan, yang tersisa 430 siswa yang akan direkam sepanjang Senin (22/1).

Namun, Yuda menegaskan, perekaman E-KTP untuk pemilih pemula tidak hanya di sekolah. Seluruh warga dapat melakukan perekaman secara mandiri di sebanyak 23 kantor kecamatan masing-masing. ● **pra**



PRODUKSI KAREMEL KHAS PANGALENGAN

Pekerja menyelesaikan produksi karamel di Rumah Produksi Karamel Biladi, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/1). Produsen tersebut mampu memproduksi dua kuintal karamel per hari dan dijual Rp60 ribu per kilogram yang kemudian dijual ke berbagai kawasan wisata di Jawa Barat.

JPO Baru Diresmikan Malah Jadi Tempat Perosotan Bocil Depok saat Hujan

DEPOK (IM)- Viral di media sosial, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Salak, Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, menjadi arena bermain perosotan oleh sekelompok bocah kecil saat hujan.

Diketahui JPO beserta Taman Secawan itu belum lama diresmikan Wali Kota Depok, Mohammad Idris pada akhir Desember 2023 silam. Namanya dipilih sebagai akronim dari sungai elok, cantik, dan menawan.

JPO itu menghubungkan antar sisi Taman Secawan yang terdapat di sempadan Kali Cabang Tengah, Jalan Salak, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Kondisi Jalan Salak terbilang ramai lalu lintas menghubungkan Jalan Raya Sawangan dengan Jalan Raya Margonda melewati Under-

pass Dewi Sartika. "JPO dipakai perosotan oleh anak kecil saat hujan, harusnya dibuatkan taman bermain untuk anak-anak di Taman Secawan," tulis caption laman Instagram @infodepok24 dikutip, Senin (22/1).

Dalam unggahan video tersebut terlihat sekelompok bocil asyik merosot di JPO tersebut. Terlihat silih berganti merosot pada bagian marka kuning khusus disabilitas itu. Video perosotan JPO tersebut viral sontak mengundang komentar warganet.

"Terima kasih Pak Wali sudah memberikan mainan baru yang cukup berbahaya untuk anak-anak Depok," tulis laman Instagram @bukti.**.

"Capek ni baru, biar berguna dikit jembatan," timpal IG @fazribayhaq***. ● **yan**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

BANJIR LUAPAN SUNGAI BATANGHARI DI JAMBI

Foto udara kawasan permukiman yang terendam banjir luapan Sungai Batanghari di Tahtul Yaman, Pelayangan, Jambi, Senin (22/1). Ribuan rumah dan fasilitas umum di tiga kecamatan yakni Pelayangan, Danau Teluk, dan Danau Sipin Kota Jambi terendam banjir luapan Sungai Batanghari yang terus meninggi dalam dua minggu terakhir.

Ketua DPRD Perjuangkan Nasib Guru PPPK Kota Bogor

Ketua FGSN Kota Bogor, Yayan Suryahman menyampaikan, untuk memperjuangkan haknya, para guru sudah mencoba berkomunikasi dengan BKPSDM Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Dewan Pendidikan Kota Bogor. Namun, dari semua hasil pertemuan tersebut, para guru belum mendapatkan kepastian ikhwal haknya.

BOGOR (IM)- Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menampung aspirasi Forum Guru Swasta Nasional (FGSN) Kota Bogor yang mengeluhkan prosedur penerimaan PPPK yang dianggap menyalahi aturan.

FGSN mengaku penyalahgunaan aturan dalam penerimaan PPK sebab para guru yang sudah dinyatakan lulus tes, hingga kini belum mendapatkan kejelasan terkait penempatan dan pelantikan.

Menjawab harapan

tersebut, Atang secara tegas memberikan kepastian kepada para guru bahwa DPRD Kota Bogor akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan menggelar rapat kerja dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sambil mempelajari aduan dan aspirasi dari FGSN Kota Bogor.

"Yang pasti, saya baru dapat informasi sekarang dan duduk permasalahannya baru dapat, nah kami akan mempelajari secara lengkap permasalahan ini," ungkap Atang kepada wartawan pada Senin (22/1).

"Ya, Insya Allah, pekan ini kami akan menggelar rapat dengan mengundang Pemkot dan pihak FGSN nanti juga harus hadir, agar bisa didapatkan solusi atas

aduan ini," tegas Atang.

Sementara itu, Ketua FGSN Kota Bogor, Yayan Suryahman menyampaikan, untuk memperjuangkan haknya, para guru sudah mencoba berkomunikasi dengan BKPSDM Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Dewan Pendidikan Kota Bogor. Namun, dari semua hasil pertemuan tersebut, para guru belum mendapatkan kepastian ikhwal haknya.

"Jadi adanya kekecewaan kami guru swasta, ketika sudah mendapatkan pengumuman dan melewati passing grade, tetapi kami tidak kebagian formasi, maka dari sini bermula kekecewaan kami," tuturnya.

"Maka harapannya bahwa aspirasi ini kami sampaikan ke DPRD dengan harapan anggota dewan bisa memberikan rasa keadilan bagi kami," tambah Yayan.

Yayan menjelaskan, sementara itu, FGSN Kota Bogor bersama FGSN seluruh kota/kabupaten Se Indonesia berencana akan melakukan upaya menemui DPR RI dalam waktu dekat.

"Ya, kami berharap permasalahan ini bisa diselesaikan keseluruhannya. Untuk Kota Bogor kami sudah diterima Ketua DPRD Kota Bogor H Atang Trisnanto bersama anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni," pungkasnya. ● **gio**

Pemkab Cirebon Buka Lelang Jabatan untuk Jabatan Kadishub

CIREBON (IM)- Pemkab Cirebon secara resmi membuka lelang jabatan atau open bidding untuk jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Cirebon.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara terbuka, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Demikian dikatakan Kabid Pengembangan Karir dan Kependidikan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Akhmad Rodi Sakho. Menurutnya, pelaksanaan open bidding juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Serta, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019.

"Isinya tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah," kata Sakho, Senin (22/1).

Sakho menjelaskan, sesuai jadwal proses shelter untuk open bidding tersebut kurang lebih akan berjalan sekitar satu bulan. Hal itu karena pensiunnya Kadishub Kabupaten Cirebon sekarang, yaitu Asdullah Anwar pada bulan Maret tahun ini.

Untuk itu, ada beberapa persyaratan yang harus

dilengkapi oleh para calon peserta open bidding. Diantaranya tidak terafiliasi atau menjadi anggota partai politik dan menyerahkan SPT Tahunan dan LHKPN 2023.

"Pendaftaran dibuka 22 Januari, lalu di 6 Februari ada pengumuman seleksi administrasi. Terus ada beberapa test lainnya lagi dan ditanggal 21 Februari 2024 pengumuman hasil open bidding," ucapnya.

Dia menambahkan, proses lelang jabatan tersebut nantinya diproyeksikan untuk mengisi jabatan yang akan ditinggalkan oleh Kadishub Kabupaten Cirebon, Asdullah Anwar Syam yang akan pensiun di Maret 2024. ● **pra**



IDN/ANTARA

DAMPAK SIKLON TROPIS ANGGREK DI YOGYAKARTA

Relawan mengangkut kayu dari rumah yang longsor di Mlati, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (22/1). Curah hujan tinggi dampak dari siklon tropis Anggrek yang melanda wilayah DI Yogyakarta mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan talud rumah warga longsor sehingga menimpa bangunan kampus Mahakarya Asia.

KURANGI SAMPAH ORGANIK RUMAH TANGGA

DLH KBB Jalin Kerjasama dengan Pembudidaya Maggot

NGAMPRAH (IM)- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjalin kerjasama dengan pembudidaya maggot untuk mengurangi sampah organik yang dihasilkan rumah tangga.

Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 02/PBLS.04/DLH. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa TPA Sarimukti hanya menampung 50 persen residu di mana terhitung L sejak 1 Januari 2024 tidak ada lagi sampah organik yang masuk ke TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Sejak 1 Januari 2024 KBB sudah tak lagi membuang sampah organik ke TPA Sarimukti. Untuk menangani sampah organik, DLH menjalin kerja sama dengan pembudidaya maggot," kata Kepala DLH KBB, Ibrahim Aji saat dihubungi, Senin (22/1).

"Sudah ada beberapa pembudidaya maggot yang sudah siap menampung sampah organik dari KBB," sambungnya. Di Bandung Barat, sebut Ibrahim, terdapat 40 kelompok pembudidaya maggot. Namun, yang sudah menyatakan kesiapannya untuk menampung sampah organik sebanyak 11 kelompok.

"Dari 40 kelompok sudah ada 11 kelompoknya yang menyatakan kesiapan. Ini baru data sementara, mungkin bisa berkembang lagi. Karena kami akan coba menjalin kerjasama dengan pembudidaya maggot yang tidak aktif," sebutnya.

Ibrahim mengakui sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti visa mencapai 160 ton per hari. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa persen sampah organik dari jumlah tersebut.

Sampai sejauh ini belum ada penelitian mengenai produksi sampah organik maupun anorganik," ucapnya.

Menurutnya, pembudidaya maggot menyambut baik rencana Pemda Bandung Barat tersebut. Namun, mereka minta difasilitasi beberapa alat penunjang pengolahan sampah organik untuk pakan maggot.

"Artinya sekitar 70 sampai 80 ton sampah organik ini siap ditampung pembudidaya maggot di KBB. Pembudidaya maggot meminta alat pemilah dan pembubur sampah organik," tuturnya.

Saat ini, sebut Ibrahim, pihaknya sedang menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi permintaan tersebut.

"Tapi, sebelum pengadaan alat tersebut, DLH KBB melakukan studi banding ke Kabupaten Bandung yang sudah memiliki alat pembubur sampah organik," tandasnya. ● **pra**